

PUBLIKASI ILMIAH
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

Oleh:

MARTINUS, SH.
A.21212040

Dr. Hermansyah. SH., M.Hum
H.M. Noor Ramli, SH., M.S.

ABSTRACT

This thesis is studies of the problem Effectiveness Law Enforcement Local Regulation By Civil Service Police Unit In Bengkayang Regency. By the legal and social research method be concluded, that: 1. Implementation Task Force Civil Service Police in Enforcing Regulation Bengkayang area is less effective because it is confined to the enforcement action is non-judicial. This is due to the research carried out not one member Civil Service Police Unit in Bengkayang educated and diangkat as Acting Civil Servant (investigators). Consequently, the criminal penalties, criminal fines and penal substitute for losses in local legislation can not be enforced effectively. 2. Efforts that can be done to streamline the implementation of the Civil Service Police Unit duties in enforcing regulations Bengkayang area is to educate the Civil Service Police Unit Bengkayang to be appointed as Acting Civil Servant, in compliance with the applicable legislation. If this can be done then the Civil Service Police Unit assigned and appointed as a civil servant investigators (investigators) will be able to take legal action against the non Yuistisial violation of local regulations. Further recommended: 1. Bengkayang to Local Government, should as soon as possible to send members of Civil Service Police Unit Bengkayang for students as investigators by the Board of Education and Training Department of the Interior and the Bureau of Education and Training West Kalimantan Province. 2. Bengkayang Local Government, should also prepare a program budget of education and training members of the Civil Service Police Unit investigators as required in the Regional Budget Bengkayang. 3. Bengkayang Local Government, also can work together with the Municipality and the Municipal Government in West Kalimantan province to jointly submit Parjanya Service Police Unit members to participate in the education and training of investigators in the Bureau of Education and Training Department of the Interior and the Board of Education and Training West Kalimantan Province. 4. Against Civil Service Police Unit members who have received the Graduate Certificate of Education Investigator (STTPP) to immediately proposed to be appointed as investigators to the Minister of Justice and Human Rights.

Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Local Regulations, and the Civil Service Police Unit.

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Bengkayang. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang kurang efektif karena hanya terbatas pada tindakan penertiban bersifat non yustisial. Hal tersebut disebabkan sampai penelitian ini dilakukan belum ada satupun anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkayang yang dididik dan diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Konsekuensinya, sanksi pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengganti kerugian yang diatur dalam peraturan daerah belum dapat ditegakkan secara efektif. 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong

Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang adalah dengan mendidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang untuk diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ini dapat dilakukan maka Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dan diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan dapat melakukan tindakan hukum Non Yuistisial terhadap pelanggaran peraturan daerah. Selanjutnya direkomendasikan: 1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, hendaknya secepat mungkin mengirimkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang untuk didik sebagai PPNS oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, juga harus menyiapkan anggaran program pendidikan dan pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PPNS sesuai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, juga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk bersama-sama mengirimkan anggota Satuan Polisi Pamong Prajanya guna mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS di Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat. 4. Terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan Penyidik (STTPP) agar segera diusulkan untuk diangkat sebagai PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Latar Belakang

Negara adalah organisasi kekuasaan yang mempersatukan satuan masyarakat manusia tanpa membedakan suku, agama, bahasa, dan warna kulit (ras) dalam suatu wilayah sebagai bangsa, untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai organisasi kekuasaan, maka kekuasaan Negara itu diatribusikan ke dalam lembaga-lembaga Negara dan badan-badan Pemerintahan di tingkat Pusat maupun Daerah yang diatur, dilaksanakan dan ditegakkan berdasarkan atas hukum (Peraturan Perundang-Undangan).

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan Negara (Kedaulatan Negara), tujuan Negara, lembaga-lembaga Negara, dan badan-badan pemerintahan itu sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang kemudian dijabarkan pelaksanaannya ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan Daerah.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanahkan UUD NRI 1945 adalah untuk: Melindungi segenab bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut aktif dalam perdamaian dunia; dan Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima tujuan Negara tersebut diatur, dilaksanakan dan ditegakkan secara berkelanjutan komprehensif integral berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Tujuan Negara yang pertama mengandung makna diperlukannya Institusi Tentara Nasional Indonesia yang berfungsi mengelola bidang pertahanan Negara, Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengelola urusan keamanan, ketertiban, perlindungan, dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Juga diperlukan institusi penegak dan badan-badan pemerintahan lainnya yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan Pusat maupun Daerah. Tanpa adanya tujuan Negara yang pertama, maka upaya mewujudkan tujuan Negara yang keempat sampai kelima tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik.

Terkait dengan tujuan Negara yang pertama itu, kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan wajib sebagaimana ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan wajib Daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) c, adalah : **“penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”**. Kemudian dipertegas Pasal 148 yang menyatakan: **“Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja, yang pembentukan dan susunan organisasinya diatur berpedoman pada Peraturan Pemerintah”**.

Pada saat ini, yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah,

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kemudian di seluruh daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dibentuk Satpol PP yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Perangkat Daerah. Khusus untuk Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang ditentukan berdasarkan Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2012, dengan tugas pokok: **“menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”**.

Penyidik PNS dimaksud, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Salah satu Penyidiki Negeri Sipil (PPNS) yang seharusnya diberikan kewenangan penyidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi sampai saat penelitian ini dilakukan, ternyata tidak ada satupun dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Akibatnya selama tahun 2012, 2013 dan 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang hanya melaksanakan tugas penegakan hukum peraturan daerah bersifat **Non Yustisial** melalui kegiatan **operasi rutin, Insedentil, dan berkala**. Karena itu **apabila ditemukan pelanggaran dalam operasi Non Yustisial**, maka kepada pelanggarnya hanya diberikan **teguran lisan dan teguran tertulis**. Padahal seharusnya dapat diproses untuk dikenakan **sanksi pidana kurungan, sanksi pidana denda, dan sanksi pidana pengganti kerugian** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan karena sampai saat ini belum ada satupun anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan **tindak hukum bersifat yudisial**.

Permasalahan

Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang?

Pembahasan

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang

1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang dengan luas wilayah 5.396,30 km² atau sekitar 3,68 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Awalnya Kabupaten hanya terdiri atas 10 Kecamatan, namun kemudian dimekarkan menjadi 17 kecamatan 2 (dua) Kelurahan dan 126 Desa. Ketujuhbelas kecamatan dimaksud adalah sebagai berikut: Bengkayang, Capkala, Jagoi Babang, Ledo, Lembah Bawang, Lumar, Monterado, Samalantan, Sanggau Ledo, Seluas, Siding, Sungai Betung, Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Suti Semarang, Teriak, dan Tujuh Belas.

Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak-Malaysia Timur dan Kabupaten Sambas; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pontianak; Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Kota Singkawang; dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak.

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang pada tahun 2012 sebanyak 224.407 jiwa terdiri atas laki-laki 116.908 jiwa dan perempuan 107.499 jiwa dengan kepadatan penduduk 42 jiwa/Km².

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satpol PP Bengkayang

Seperti telah dikemukakan pada Bab II bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan **Peraturan Daerah (Perda)** dan **penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat** dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian Pasal 149 menentukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh **pejabat penyidik (PPNS)** dan **penuntut umum** sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dioperasionisasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang intinya antara lain menentukan:

- a. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- b. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan **Peraturan Daerah (Perda)** dan **menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat** serta perlindungan masyarakat, sebagai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - 2) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;

- 3) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - 4) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - 5) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
 - 6) pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
 - 7) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- d. Wewenang Polisi Pamong Praja :
- 1) melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
 - 2) menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - 3) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - 4) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
 - 5) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- e. Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:¹
- 1) pegawai negeri sipil;
 - 2) berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
 - 3) tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
 - 4) berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun; e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
- f. Tata Kerja dan Kerjasama:
- 1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
 - 2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

¹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- 4) Dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya Satpol PP bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
 - 5) Kerja sama dengan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya dilakukan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.
3. Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang Sampai tahun 2014 sebanyak 16 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala Satuan; 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag); 3 (tiga) orang Kepala Seksi; 11 (sebelas) orang Staf pol PP. Keseluruhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut **belum ada satupun yang dididik dan diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**. Selain anggota Satpol PP tersebut terdapat sejumlah tenaga honorer sebagai berikut: 1) Honorer Daerah sebanyak 8 (delapan) orang; 2) Honorer Kantor sebanyak 13 (tigabelas) orang; 3) Bantuan Pol PP sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) orang.
4. Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sebanyak 26 Peraturan Daerah, diantaranya yang menjadi obyek penelitian ini adalah : 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah; dan 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Gangguan.

5. Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden penelitian ini diperoleh informasi, bahwa selama tahun 2012, 2013 dan 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan tugas penegakan hukum peraturan daerah bersifat **Non Yustisial** melalui kegiatan **operasi rutin**, **Insedentil**, dan **berkala**. Hal ini disebabkan sampai saat ini **tidak satupun anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang yang dididik dan ditetapkan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil**. Karena itu **apabila ditemukan pelanggaran** dalam **operasi Non Yustisial**, maka kepada pelanggarnya hanya diberikan **teguran lisan** dan **teguran tertulis** sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum terdapat 34 Pasal yang dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama

6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah, apabila dilanggar oleh setiap orang di wilayah Kabupaten Bengkayang. Namun dalam pelaksanaannya **ternyata sanksi kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-** tidak pernah diterapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung terdapat 8 jenis pelanggaran yang dikenakan **sanksi administrasi** dan **sanksi pidana** apabila dilanggar oleh setiap orang di Kabupaten Bengkayang, yaitu: Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam **Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)** dan/atau **Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)** dapat dikenai **sanksi administrasi**, dan/atau **sanksi pidana**.²

- 1) **Sanksi administrasi** berupa : **peringatan tertulis**; pembatasan kegiatan pembangunan; penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; pembekuan IMB gedung; pencabutan IMB gedung; pembekuan SLF bangunan gedung; pencabutan SLF bangunan gedung; atau perintah pembongkaran bangunan gedung;
- 2) **Sanksi Denda** : paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun, yang disetor ke rekening kas Pemerintah Daerah.
- 3) **Sanksi Pidana** berupa : Pidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian meliputi:
 - (1) pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
 - (2) pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat;
 - (3) pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden penelitian ini, ternyata selama tahun 2012, 2013 dan 2014 hanya ada **7 kasus pelanggaran** yang dikenakan **sanksi administrasi teguran tertulis** karena Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam **Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)** dan/atau

² Pasal 150 dan Pasal 151 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF). Dengan kata lain, tidak ada kasus yang dikenakan **sanksi denda administrasi, pidana kurungan, pidana denda dan pengganti kerugian.**

Perlu ditegaskan, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, Setiap bangunan gedung di Kabupaten Bengkayang harus memenuhi **persyaratan administratif** dan **persyaratan teknis** sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB; perijinan yang terkait dengan lingkungan hidup.

Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi: persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas: persyaratan peruntukan lokasi; intensitas bangunan gedung; arsitektur bangunan gedung; ruang terbuka hijau; pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu; rencana tata bangunan dan lingkungan.

Persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri atas: persyaratan keselamatan; persyaratan kesehatan; persyaratan kenyamanan; dan persyaratan kemudahan.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat **9 jenis pelanggaran** yang dikenakan **sanksi pidana** dan **denda** apabila dilanggar oleh setiap orang di Kabupaten Bengkayang, yaitu:³

- 1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah **tanpa izin** diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang melanggar larangan : a. memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir,⁴ diancam pidana atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku.

³ Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁴ Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

- 3) Setiap orang yang melanggar larangan : membuang sampah tidak pada tempat dan jam yang telah ditentukan dan disediakan, membakar sampah secara terbuka, di lokasi TPS, TPST dan TPA, dan membuang sampah tidak pada waktu yang di tentukan,⁵ dikenakan denda paling banyak Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan.

Namun dari hasil wawancara peneliti dengan responden penelitian ini, selama tahun 2012, 2013 dan 2014 tidak ada satupun orang pribadi atau badan hukum yang dikenakan sanksi pidana dan denda di Kabupaten Bengkayang. Padahal sebenarnya cukup banyak kasus-kasus membuang sampah tidak pada tempat dan jam yang telah ditentukan dan disediakan, membakar sampah secara terbuka, di lokasi Tempat penampungan sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan/atau membuang sampah tidak pada waktu yang di tentukan.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Gangguan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Gangguan terdapat 2 **jenis pelanggaran** yang dikenakan **sanksi pidana** dan **denda** apabila dilanggar oleh setiap orang di Kabupaten Bengkayang, yaitu:⁶

- 1) Setiap orang yang mendirikan atau menjalankan **tempat usaha secara terus menerus tanpa izin** dapat di pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁷
- 2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas setiap orang yang melakukan tindak pidana dan menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Akan tetapi dari hasil wawancara peneliti dengan responden penelitian ini, selama tahun 2012, 2013 dan 2014 tidak ada satupun orang pribadi atau badan hukum yang dikenakan sanksi pidana dan denda di Kabupaten Bengkayang. Padahal menurut mereka sebenarnya ada tempat usaha yang belum memiliki izin gangguan di Kabupaten Bengkayang, namun tidak ditindak sebagaimana mestinya.

Selain tugas penegakan peraturan daerah di atas, selama tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang juga telah melaksanakan tugas **penyelenggaraan ketertiban umum** dan **ketentraman masyarakat** bersifat preventif sebagai berikut:

⁵ Pasal 24 huruf e, huruf h, dan huruf h, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁶ Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Gangguan.

⁷ Pasal 4 menentukan: Setiap orang dan/atau Badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Tahun 1926 Jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 diwajibkan memiliki Izin Gangguan (HO).

- 1) Kegiatan operasi (Patroli) wilayah yang dilakukan secara rutin pada waktu pagi, sore dan malam hari:
 - a) Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dilakukan 1 (satu) minggu sekali.
 - b) Operasi Penertiban HO (Hinder Ordonansie) atau Ijin Gangguan dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
 - c) Operasi Penertiban IMB (ijin mendirikan bangunan) dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
 - d) Operasi Penertiban reklame dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
 - e) Operasi Penertiban PKL (pedagang kaki lima) di Kota Bengkulu dilakukan 1 (satu) Minggu sekali.
 - f) Patroli monitoring pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- 2) Penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah yang menyangkut penertiban kepentingan umum.
- 3) Mengadakan operasi berkala meliputi : Operasi penertiban becak; Operasi KTP; Operasi penertiban lalu lintas; Operasi Kebersihan dan Tertib Pedagang Kaki Lima; Operasi penertiban IMB; Operasi WTS/germo liar; Operasi penertiban spanduk; dan Operasi minuman keras.
- 4) Mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran pada hari-hari besar keagamaan dan hari-hari keramaian tertentu ;
- 5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu dalam menegakkan peraturan daerah dapat dikatakan **belum efektif**, karena hanya sebatas penegakan hukum **Non Yustisial**. Padahal berdasarkan keempat Peraturan Daerah di atas, telah ditentukan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja), yang berwenang:⁸

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

⁸ Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum; Pasal 154 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung; Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah; dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Gangguan.

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut meskipun tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan, namun dapat membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian;
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

Mengapa pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut tidak bisa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang dalam menegakkan Peraturan Daerah? Jawabannya tiada lain karena, sampai saat penelitian ini dilakukan tidak ada satupun dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang yang didik dan diangkat sebagai **Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**. Konsekuensinya, dalam menegakkan Peraturan Daerah, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang hanya terbatas pada tindakan hukum (kepolisian) **Non Yustisial**. Sehingga penerapan sanksi pidana **berupa pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengganti kerugian** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bengkayang.

Kesimpulan

Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang kurang efektif karena hanya terbatas pada tindakan penertiban bersifat non yustisial. Hal tersebut disebabkan sampai penelitian ini dilakukan belum ada satupun anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkayang yang didik dan diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Konsekuensinya, sanksi pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengganti kerugian yang diatur dalam peraturan daerah belum dapat ditegakkan secara efektif.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- A Hamid Atamimi, 1990. Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Aloysius Wisnubroto, 1999. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Bambang Poernomo, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1996. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang : Balai Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bernard Arief Sidharta, 1999. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung : Mandar Madju.
- ELSAM, 2005. Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, Jakarta : Huma.
- Erman Rajagukguk, 2001. Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, Jakarta: Chandra Pratama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka.
- M. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- _____, 2001, Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia, UII Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Indonesia, 30 Oktober 1993.
- Moeljatno, 1983. Azas-azas Hukum Pidana, Cet. I, Jakarta : Bina Aksara.
- _____, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- _____, 1993. Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit Alumni.
- Muhammad Tahir Azhary, 2007. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

